

**ANALISIS PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

THESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**



**Di susun oleh : Lissari
Nim : 201710240211003**

**MAGISTER KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

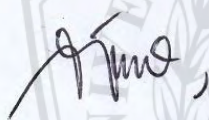
2018

**ANALISIS PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

LISSARI
201710240211003

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, Selasa/16 Juli 2019

Pembimbing Utama



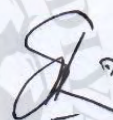
Dr. Ahmad Juanda

Direktur
Program Pascasarjana



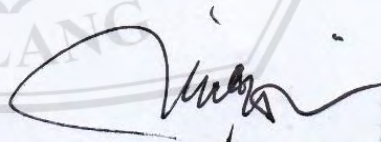
Achsaanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhamad Syahri

Ketua Program Studi
Magister Kebijakan dan
Pengembangan Pendidikan



Dr. Agus Tinus

TESIS

LISSARI
201710240211003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Selasa/ 16 Juli 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	Dr. Ahmad Juanda
Sekretaris	Dr. Mohamad Syahri
Penguji I	Dr. Estu Widada
Penguji II	Dr. Siti Fatimah Soenaryo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lissari

Nim : 201710240211003

Program studi : Magister Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan

Drngan ini menyatakan dengan sebenar-benar bahwa :

TESIS dengan judul : ANALISIS PROGRAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.

Adalah karia saya dan dalam naskah tesis ini tidak dapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis orang lain , baik sebagian atau keseluruhan, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI, saya bersedia Tesis di GUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH DIPEROLEH DIBATALKAN.

2. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang 06, Juni 2019

Yang menyatakan



Lissari

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan lagi penyayang segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah, karena atas berkat rahmatnya, saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan judul Analisis kebijakan program pendidikan profesi guru sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru PPG di Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga bisa diselesaikan tepat waktu.

Saya menyadari bahwa, dari awal perkuliahan sampai pada penyelesaian Tesis ini bukanlah perkara yang mudah, namun bukan juga perkara yang sulit karena terbimbing dan bantuan dari berbagai pihak semua ini berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih

Kepada:

1. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Akhsanul In'am. Ph.D, selaku direktorat program pasca sarjana universitas Muhammadiyah Malang
3. Dr. Agus Tinus, M.Pd selaku ketua program studi magister kebijakan dan pengembangan pendidikan, yang selalu mengingatkan dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Dr. Ahmad Juanda, AK,MM, selaku pembimbing utama, yang selalu menyediakan waktu, tenaga , pikiran untuk terus mengarahkan saya agar bisa menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Mohamad Syahri, M.Si, selaku pembimbing pendamping, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan memberikan motivasi kepada saya untuk terus semangat menyelesaikan tesis.
6. Kepala program PPG Dr. Trisakti Handayani, M.Si, yang telah membantu interview dalam penelitian.
7. Rekan – rekan mahasiswa satu angkatan yang selalu berbagi suka duka serta selalu memberikan motivasi satu sama lain.

ABSTRAK

Lissari, 2019. *Analisis Program Pendidikan Profesi Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Universitas Muhammadiyah Malang.* Tesis pembimbing utama : Ahmad Juanda, AK,MM, Pembimbing pendamping, Mohamad Syahri, M.Si, Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Program Pasca sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: lissaribintiislamuddin@gmail.com

Guru sebagai sebuah profesi harus mampu melakukan bimbingan dan pelatihan serta mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan untuk terpenuhinya empat kompetensi guru. Sehingga perlu melakukan pelatihan untuk meningkatkan profesionalismenya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana langkah yang dilakukan pengelola pendidikan profesi guru sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru di UMM? 2), apa kendala yang dihadapi pendidikan profesi guru sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru di UMM? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi.

Hasil yang diperoleh 1) implementasi pelaksanaan PPG, melalui serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan pembelajaran di dalam kelas, PPL di sekolah, rangkaian kegiatan PPG adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang mencakup : 1) mencetak guru yang profesional, 2) guru yang trampil, 3) memotivasi guru untuk menjadi guru yang profesional, 4) guru yang berdampak positif pada kegiatan mengajar di dalam kelas. Hal yang menghambat PPG UMM di pengaruhi oleh ketidak siapan peserta dalam menerapkan kurikulum berbasis K13, dikarenakan K13 masih belum digunakan oleh semua sekolah

Kata kunci: Analisis Program PPG, Profesionalisme Guru

ABSTRACT

Lissari,2019. *Analysis of the Teacher Professional Education Program as an Effort to Improve Teacher Professionalism at the University of Muhammadiyah Malang.*
Master of Education Policy and Development Muhammadiyah University.
Advisor (I) Dr. Ahmad Juanda, (II) Dr. Mohamad Syahri
Email: lissaribintiislamuddin@gmail.com

Teachers as a profession must be able to conduct guidance and training and be able to conduct research and develop professionalism in a sustainable manner to fulfill the four teacher competencies .That it is necessary to conduct training to improve professionalism. This study aims to find out: 1) What are the steps taken by the management of teacher professional education as an effort to increase the professionalism of teachers at UMM 2), what are the obstacles faced by teacher professional education as an effort to increase teacher professionalism at UMM? This study uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques used using documentation techniques, interviews and observations.

The results obtained are 1) implementation of PPG implementation, through a series of activities which include learning activities in the classroom, PPL in schools, a series of PPG activities to achieve educational goals that include: 1) printing professional teachers, 2) skilled teachers, 3) motivate teachers to become professional teachers, 4) teachers who have a positive impact on teaching activities in the classroom. The thing that hinders PPG UMM is influenced by participants' unpreparedness in implementing K13 based curriculum, because K13 is still not used by all schools

Keywords: Analysis of Program PPG, Teacher Professionalism

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
A. PENDAHULUAN	1
B. KAJIAN PUSTAKA	5
1. Landasan Hukum Pendidikan Profesi Guru.....	5
2. Pendidikan Profesi Guru	6
3 . Profesionalisme Guru	8
4. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan	9
5. Faktor yang Mempengaruhi Guru Profesional	9
6. Kompetensi Guru Profesional.....	10
7. Permasalahan Profesional Guru.....	13
8. Implementasi Kebijakan PPG	15
C. METODE PENELITIAN.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Lokasi Penelitian.....	17
3. Teknik pengumpulan Data	17
4. Subjek Penelitian	17
5. Teknik Analisis Data	18
6. Penguji Keabsahan Data	19
D. HASIL PENELITIAN.....	19
1. Langkah Meningkatkan Profesionalisme Guru.	19
2. Kendala yang dihadapi pengelola pendidikan profesi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru di umm.	23
E. PEMBAHASAN	26
Implementasi kebijakan PPG di UMM.....	26
1. isi kebijakan	26
2. Lingkungan Implementasi	27
Kendala yang dihadapi dalam implementasi PPG	29

F. KESIMPULAN DAN SARAN.....	29
Kesimpulan	29
Saran	30
DAFTAR RUJUKAN	31



A. PENDAHULUAN

Terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam segala aspek kehidupan menjadi salah satu tantangan di dunia pendidikan. Perubahan tersebut berdampak terhadap tuntutan akan kualitas pendidikan secara umum, dan kualitas pendidikan guru secara khusus untuk menghasilkan guru yang profesional. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tuntutan peraturan perundangan bahwa guru harus berkualifikasi S- 1/ D- IV dan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program pendidikan profesi guru. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai program menciptakan sebuah upaya untuk memberikan pembinaan terhadap guru agar tercipta guru-guru yang profesional. Arifin, (2013)

Pembinaan terhadap guru yang professional telah dinaungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Sertifikasi Guru. Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Adanya peraturan pemerintah tersebut membawa konsekuensi terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya mutu/ kualitas guru. Dengan meningkatkan mutu pendidikan dimaksudkan dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah sehingga lebih berkualitas sesuai standar kelayakan dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta meningkatkan profesionalisme. (Hidayah 2013).

Profesi guru secara konseptual merupakan sebuah pengakuan atas kemampuan mendidik, dukungan sekaligus penerimaan masyarakat terhadap profesi guru, dan merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk mendidik peserta didik. Oleh karenanya, di dalam permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan pasal 2 tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindak lanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbing, dan pelatihan peserta didik, maupun melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Program sertifikasi guru

merupakan salah satu program yang di design untuk melihat kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran yang profesional yang akan menjamin mutu pendidikan (Yusuf dan Ruslan, 2014).

kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Permendikbut Nomer 87 tahun 2013 mengumakakan bahwa program profesi guru (PPG) merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/DIV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kopetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sebagai figur utama dalam proses pendidikan di sekolah, guru memang peran utama dalam menentukan keberhasilan peserta didik, terutama kaitanya dengan proses pencapaian hasil belajar yang baik (Zulfikar 2009). Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil belajar yang berkualitas. Tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. (Yusuf dan Ruslan, 2014). dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Sujanto 2013).

berdasarkan penelitian Setiawan (2017), menunjukan bahwa penguasaan kopetensi pedagogik guru produktif SMA 1 Wlingi Blitar masih kurang 46, 86%. hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan penguasaan terhadap materi pengembangan peserta didik, teori-teori belajar, pengembangan kurikulum , teknik evaluasi, penguasaan terhadap model-model dan metode pembelajaran.

Hal serupa juga di kemukakan oleh Innayatullah (2011) dalam penelitiannya menyatakan hambatan dalam upaya peningkatan mutu belajar di SMA N di kota Bekasi dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi, 1) sifat konservatif guru, 2) kurang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, 3) rendahnya motivasi guru. Sedangkan faktor eksternal, 1) kurangnya kegiatan seminar dan lokakarya 2) media dan buku-buku paket, 3) kurangnya motivasi orang tua. Sutoyo (2004). permasalahan guru Indonesia tersebut secara tidak langsung berkaitan tentang masalah mutu profesional guru yang belum memadai. (Haryono 2014)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas sekaligus mensejahterakan guru, adalah dengan memberikan tunjangan sertifikasi. Sertifikasi guru bertujuan untuk : 1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, 2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, 3) meningkatkan kesejahteraan guru, 4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Agung 2011). Akan tetapi, dari hasil penelitian Gunawan (2016) menunjukkan kompetensi profesionalisme guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan telah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada mutu pendidikan khususnya kompetensi guru.

Lembaga pendidikan tentang kependidikan (LPTK), harus mampu menghasilkan guru profesional yang menguasai baik *soft skills* maupun *hard skills*, berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan pada suatu pendidikan nasional, memiliki landasan kapasitas berupa karakter yang kuat, serta menghargai keragaman sebagai perekat integrasi bangsa. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada suatu pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui : 1), pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL) 2), portofolio, 3) pendidikan dan latihan profesi guru, 4) pendidikan profesi guru (PPG) Kartowargiran, (2010).

Akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kajian ulang atau sistem pengelolaan guru yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Upaya peningkatan kualitas mutu para guru, dilakukan dengan mengadakan kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan-pelatihan ataupun pembentukan kumpulan guru seperti musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau kelompok kerja guru (KKG) sebagai upaya meningkatkan mutu guru. (Rahmawati, 2013). salah satu peran MGMP adalah meningkatkan penguasaan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, (Arifin, 2003).

Penelitian yang dilakukan (Maksum, 2012) , diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru kelas SMA Islam Batu masih belum terlaksana secara menyeluruh. Motivasi guru dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesi guru-guru sertifikasi guru untuk mengikuti PKB masih kurang,

selain itu hambatan guru dalam mengikuti PKB terdapat pada motivasi guru itu sendiri sehingga guru sulit mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak mau berupaya untuk mengembangkan kompetensi dirinya, serta sarana dan prasarana untuk mengembangkan keprofesian berkelanjutan bagi guru masih kurang. Dalam penelitian lain menunjukan hasil kegiatan guru pasca sertifikasi yang ada di MTSN Batu dan SMAN Ngantang, diperoleh hasil dari 17 indikator yang diteliti, 7 indikator menunjukkan presentase lebih dari 50% guru selalu melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan 10 indikator lainnya menunjukkan angka di bawah 50% yang artinya banyak guru yang melakukan kegiatan pengembangan profesi pasca sertifikasi di pandang masih kurang (Margono, 2013).

Dalam upaya mewujudkan peran tersebut, guru perlu memiliki kompetensi khusus, sehingga guru dapat menjalankan peranannya secara profesional. Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, setiap calon guru perlu di bekali kemampuan mendidik secara profesional, sehingga dapat menjadi guru yang profesional di masa yang akan datang. Salah satu program yang dijalankan pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan tersebut adalah melalui program Pendidikan Profesi Guru atau yang sering dikenal dengan PPG. Untuk menyiapkan guru yang profesional, salah satu kebijakan pemerintah adalah melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). (Trianto dan Tutik, 2007).

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan salah satu strategi yang sangat tepat untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan profesional. Perlunya PPG adalah bagian dari solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait dengan permasalahan yang di hadapi guru. Pada saat ini, terdapat berbagai permasalahan yang sanga turgen, khususnya terkait dengan kondisi sumberdaya manusia (SDM) dan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini sebagaimana pernyataan Aswandi (2015) bahwa kehadiran lebih dari 400 LPTK pada saat ini dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan guru di Indonesia. Beberapa permasalahan kompleks tersebut antara lain; (1) kekurangan guru, terutama guru padadaerah-daerah khusus; (2) distribusi tida kproporsional; (3) ketidak cocokan (*mismatched*) antara latar belakang pendidikan dan tugas yang diampu; (4) kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagian berada di bawah standar; (5) kesejahteraan guru belum merata.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Pendidikan profesi guru harus ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan. PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) merupakan program pengganti akta IV yang tidak berlaku mulai tahun 2005. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar. Menurut Mohammad Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), pendidikan profesi akan melegitimasi profesi guru. Pendidikan profesi juga akan menambah gelar Gr di belakang nama guru tersebut. Karena menurut undang-undang, guru adalah profesi, sama seperti dokter.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diharapkan kompetensi dan profesionalisme guru benar-benar lebih terjamin dengan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun. PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) berlaku bagi yang ingin menjadi guru baik sarjana dari fakultas pendidikan, maupun non pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya melegalkan sarjana non kependidikan untuk menjadi guru profesional. Kedepan sarjana lulusan di luar FKIP (fakultas keguruan dan ilmu pendidikan) itu bersaing dengan sarjana yang empat tahun mengenyam kuliah kependidikan. Kebijakan membuka akses bagi sarjana non kependidikan untuk menjadi guru ini tertuang dalam Permendikbud 87/2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG).

Berdasarkan uraian tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap ‘Analisis program pendidikan profesi guru sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru di Universitas Muhammadiyah Malang’. Dengan demikian, permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, 1) Langkah apa yang dilakukan pendidikan profesi guru sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru di UMM? 2), Apa kendala yang dihadapi pendidikan profesi guru sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru di UMM?

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Landasan Hukum Pendidikan Profesi Guru

Implementasi kebijakan menyangkut kondisi riil yang sering sulit diprediksi. Pada sebuah kebijakan sering ditemukan asumsi, generalisasi, dan implikasi yang dalam implementasinya tidak mungkin dilaksanakan. Namun sebenarnya, tujuan dari peraturan yang ditetapkan tersebut mulia untuk menyelesaikan satu masalah krusial yang dialami

dunia pendidikan. Dalam hal ini, peraturan kemendikbut nomor 87 tahun 2013 tentang pendidikan profesi guru prajabatan merupakan upaya menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang pendidikan, dan propinsi dan juga merupakan upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional (Idris, 2013)

2. Pendidikan Profesi Guru

Guru merupakan salah satu unsur penting pendidikan harus berperan aktif dan mendapatkan kedudukannya sebagai tenaga yang kompeten. Guru dituntut menguasai ilmu yang akan diajarkan, teknik mengajar, dan mampu mengelola kelas dengan baik. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulative (Slamet, 2012).

Pendidikan Profesi merupakan program pendidikan tinggi yang dilaksanakan setelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru.

Program PPG didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013. Dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013 dipaparkan tujuan Program PPG adalah (a). untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; (b). Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan (c). mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sementara itu, Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.

Proses rekrutmen program PPG dapat diikuti oleh lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggara PPG mensyaratkan adanya tes

masuk bagi calon mahasiswa baru. Bagi lulusan S1 kependidikan yang telah lolos tes dapat langsung mengikuti program PPG tanpa melalui program matrikulasi. Sementara itu, untuk lulusan dari non kependidikan mereka diwajibkan untuk mengikuti matrikulasi sebelum mengikuti program PPG.

Ratna & Fitri (2015), Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi. Prosentase yang ditetapkan untuk masing-masing unit adalah:

1. Workshop: merupakan pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta program PPG agar mampu mengemas materi untuk pembelajaran bidang studi, sehingga peserta PPG siap melaksanakan PPL kependidikan. Adapun produk workshop meliputi pembuatan: silabus dan RPP, lembar kerja siswa, bahan ajar, media pembelajaran, perangkat penilaian (kisi-kisi, instrument, rubric dan kunci jawaban), dan proposal penelitian tindakan kelas (PTK). Penilaian kegiatan workshop meliputi:
 - a. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan PAP
 - b. Penilaian meliputi penilaian proses dan produk
 - c. Hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk angka/huruf atas dasar persentase pencapaian kompetensi (30%)
2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL): merupakan kegiatan praktik belajar mengajar di kelas dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus dan dinilai secara objektif dan transparan. Adapaun kegiatan PPL ini meliputi tahap pengenalan lapangan, mikro dan makro teaching, latihan mengajar terbimbing dan latihan mengajar mandiri. Penilaian kegiatan PPL meliputi:
 - a. Penilaian selama kegiatan PPL terdiri atas penilaian proses dan produk.
 - b. Penilaian proses dan produk dilakukan oleh dosen dan guru pembimbing
 - c. Bobot kelulusan PPL sebesar (40%)
3. Uji Kompetensi:
 - a. Ujian kompetensi terdiri atas ujian tulis dan ujian kinerja.
 - b. Ujian ini ditempuh setelah mahasiswa lolos dalam kegiatan workshop dan PPL

- c. Ujian tulis dilaksanakan oleh prodi penyelenggara sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh prodi dengan melibatkan organisasi profesi dan atau pihak eksternal yang professional atau relevan
- d. Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK
- e. Bobot kelulusan uji kompetensi adalah (30%)

Dari ketiga indikator di atas, mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal kelulusan (80%). Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal diberi kesempatan latihan tambahan sampai mencapai nilai minimal. Adapun ketentuan-ketentuan dalam PPG antara lain, sebagai berikut

- a) Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri; b) Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan secara objektif dan komprehensif, penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG oleh Menteri berlaku untuk kurun waktu 3 tahun, c) LPTK penyelenggara program PPG dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.

3 . Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi. Mc Cully mengartikan profesi adalah *“a vocation in which professed knowledge of some department of learning or science is used in its application to the affairs of others or in the practice of an art founded upon it”*.

Hal ini mengandung makna bahwa dalam suatu pekerjaan profesional selalu digunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang secara sengaja harus dipelajari, dan kemudian secara langsung dapat diabadikan bagi kemaslahatan orang lain (Rohman: 2007). Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. (UU RI nomor 14 tahun 2005).

Kesadaran menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Di Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis sekolah, (3)

profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan (4) profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani (Mahsunah, 2012).

Bagi guru yang profesional, dia harus memiliki kriteria-kriteria tertentu yang positif. Gilbert H. Hunt menyatakan bahwa guru yang baik itu harus memenuhi tujuh kriteria: (1) sifat positif dalam membimbing peserta didik, (2) pengetahuan yang memadai dalam mata pelajaran yang dibina, (3) mampu menyampaikan materi secara lengkap, (4) mampu menguasai metodologi pembelajaran, (5) mampu memberikan harapan riil terhadap peserta didik, (6) mampu mereaksi kebutuhan peserta didik, (7) mampu menguasai manajemen kelas. (Sudja: 2013).

Guru profesional adalah guru yang melaksanakan tugas keguruan dengan kemampuan tinggi (profesiensi) sebagai sumber kehidupan. Dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan (*competencies*) psikologis yang meliputi: (1) kompetensi kognitif (kecakapan ranah cipta); kompetensi afektif (kecakapan ranah rasa); kecakapan psikomotor (kecakapan ranah karsa).

4. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan

Pelaksanaan program pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan pasal 10 PP No. 74 Tahun 2008 menyebutkan sertifikasi pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. Beberapa ciri pendidikan profesi guru prajabatan diantaranya : 1) Adanya bidang layanan ahli yang unik dilakukan kelompok tertentu, diakui masyarakat dan pemerintah, 2) Butuh waktu relatif lama dan sungguh-sungguh untuk menguasai pengetahuan berbasis keilmuan, 3) latihan sistematis terawasi oleh supervisi profesional, 4) mengikuti imbalan layak diikuti tanggungjawab peningkatan profesionalisme berkelanjutan, sebagai penghargaan terhadap pendidikanya, 5) Memiliki organisasi profesi yang menentukan berbagai aturan terkait, misal kode etik dan lain-lain.

5. Faktor yang Mempengaruhi Guru Profesional

Profesionalitas sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru (Anwar. Us, 2015).

Untuk meningkatkan mutu guru perlu adanya kebijakan meningkatkan mutu pendidikan guru, di antaranya meningkatkan jenjang pendidikan S1/S2/S3 dan program penyetaraan

serta berbagai pelatihan dan penataran untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalitas guru. Misalnya PKG (Pusat Kegiatan Guru, dan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atau lembaga pendidikan tinggi yang mendidik para calon guru dengan merancang kurikulum yang mampu membangun kompetensi dan profesionalitas para calon guru yang siap pakai. Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya.

Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. (Anwar. Us, 2015). Guru yang profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran tetapi juga harus menguasai seluruh aspek yang ada dalam pembelajaran, karena pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik dan mencakup semua ranah pembelajaran, seperti aspek kognitif (berfikir), aspek afektif (perilaku) dan aspek psikomotor (keterampilan) (Asmarani, 2014).

Profesionalisme guru dapat dilakukan; pertama; dengan memahami tuntutan standar profesi yang ada. Kedua; mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Ketiga; membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Keempat; mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Kelima; mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pelajaran (Muhson, 2014).

Guru yang profesional bisa dipengaruhi oleh: (1) Jenjang pendidikan, (2). Pelatihan dan program penyetaraan serta berbagai penataran yang diikuti, (3). Membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, (4). Mengembangkan etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen, (5). Mengadopsi inovasi dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir.

6. Kompetensi Guru Profesional

Menurut Suryadi dan Suwarna (2004), predikat guru profesional dapat dicapai dengan memiliki karakteristik profesional, yaitu:

- 1) Kemampuan profesional (*professional capacity*), yaitu kemampuan intelegensi, sikap, nilai, dan keterampilan serta prestasi dalam pekerjaan. Secara sederhana, guru harus menguasai materi yang diajarkan.
- 2) Kompetensi upaya profesional (*professional effort*), yaitu kompetensi untuk membelajarkan siswa.
- 3) Profesional dalam pengelolaan waktu (*time devotion*).
- 4) Imbalan profesional (*professional rent*) yang dapat mensejahterakan diri dan keluarganya.

Arifin (2000) mengemukakan guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai:

- 1) Dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21;
- 2) Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia;
- 3) Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan.

Profesional guru perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru agar terus berkembang. Berbagai laporan di lapangan menunjukkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengembangan profesional guru karena model pengembangan profesional guru yang dilakukan tidak berdasarkan pada kebutuhan guru (Yusuf, 2016).

Kualitas profesionalisme guru ditunjukkan oleh lima sikap, yakni: (1) keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal; (2) meningkatkan dan memelihara citra profesi; (3) keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya; (4) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi; (5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya (Sagala, 2009).

Aqib, Zinal .(2007). Mengajukan dua syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional, yaitu harus kompeten dan memiliki komitmen tinggi. Dari guru yang memiliki kompetensi tinggi dan komitmen tinggi suatu sekolah dan peserta didik mendapatkan kontribusi optimal dalam pembelajaran yang dapat berdampak optimal pula pembentukan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai pada peserta didik.

Peningkatan kualitas guru menurut model UNESCO sebagai berikut. (1) Pendidikan pra-jabatan para guru; (2) Sertifikasi atau ijazah para guru; (3) Pengerahan atau rekrutmen dan penempatan para guru; (4) Kondisi kerja para guru, seperti besarnya kelas, jumlah jam, fasilitas pendukung diperhatikan; (5) Gaji guru yang tinggi dan menarik minat kaum muda. (Wijanarti. 2016). Dengan adanya tuntutan untuk peningkatan kualitas profesionalisme guru, maka guru harus selalu berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada, yaitu guru berupaya memahami tuntutan standar profesi yang ada dan ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru ingin meningkatkan profesionalisme. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu (1) persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara, (2) sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik, (3) untuk memenuhi standar profesi ini, guru harus belajar secara terus menerus sepanjang hayat, (4) guru harus membuka diri, mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya.

Kedua mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, artinya upaya untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru. Maka, dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan.

Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau *networking*. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui *networking* inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya dan akses sosial yang lainnya.

Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna pendidikan, merupakan suatu keharusan di era reformasi pendidikan sekarang ini. Artinya, semua sektor dan bidang dituntut memberikan pelayanan prima kepada kastemer atau pengguna. Maka, Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada pengguna yaitu siswa, orangtua dan sekolah

sebagai stakeholder. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar guru senantiasa tidak ketinggalan tidak “gaptek” (gagap teknologi) dalam kemampuan mengelola pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi dengan menggunakan LCD dan komputer (*hard technologies*) dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan (*soft technologies*) (Purwanto, <http://www.pustekkom.com>), menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Sebab, perkembangan teknologi “informasi dan internet” merupakan faktor pendukung utama percepatan yang memungkinkan tembusnya batas-batas dimensi ruang dan waktu yang tentu juga akan berpengaruh pada paradigma pendidikan termasuk profesi guru dalam menjalankan tugasnya (Corry, 2014).

Peningkatan kualitas profesionalisme guru, guru harus memahami tuntutan standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, mengembangkan etos kerja bermutu tinggi, mengadopsi inovasi dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir.

7. Permasalahan Profesional Guru

Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005** meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut data *International Education Achievement (IEA)*, 2010 . Banyak guru yang belum memiliki persyaratan kualifikasi termasuk empat standar kompetensi guru.

Keempat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) **Kompetensi pedagogik** merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum/silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (g) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- 2) **Kompetensi kepribadian** sekurang-kurangnya mencakup (a) berakhlak mulia, (b) arif dan bijaksana, (c) mantap, (d) berwibawa, (e) stabil, (f) dewasa, (g) jujur, (h) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (i) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (j) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- 3) **Kompetensi sosial** merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi (a) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (e) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.
- 4) **Kompetensi profesional** merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurang meliputi penguasaan (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (b) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren

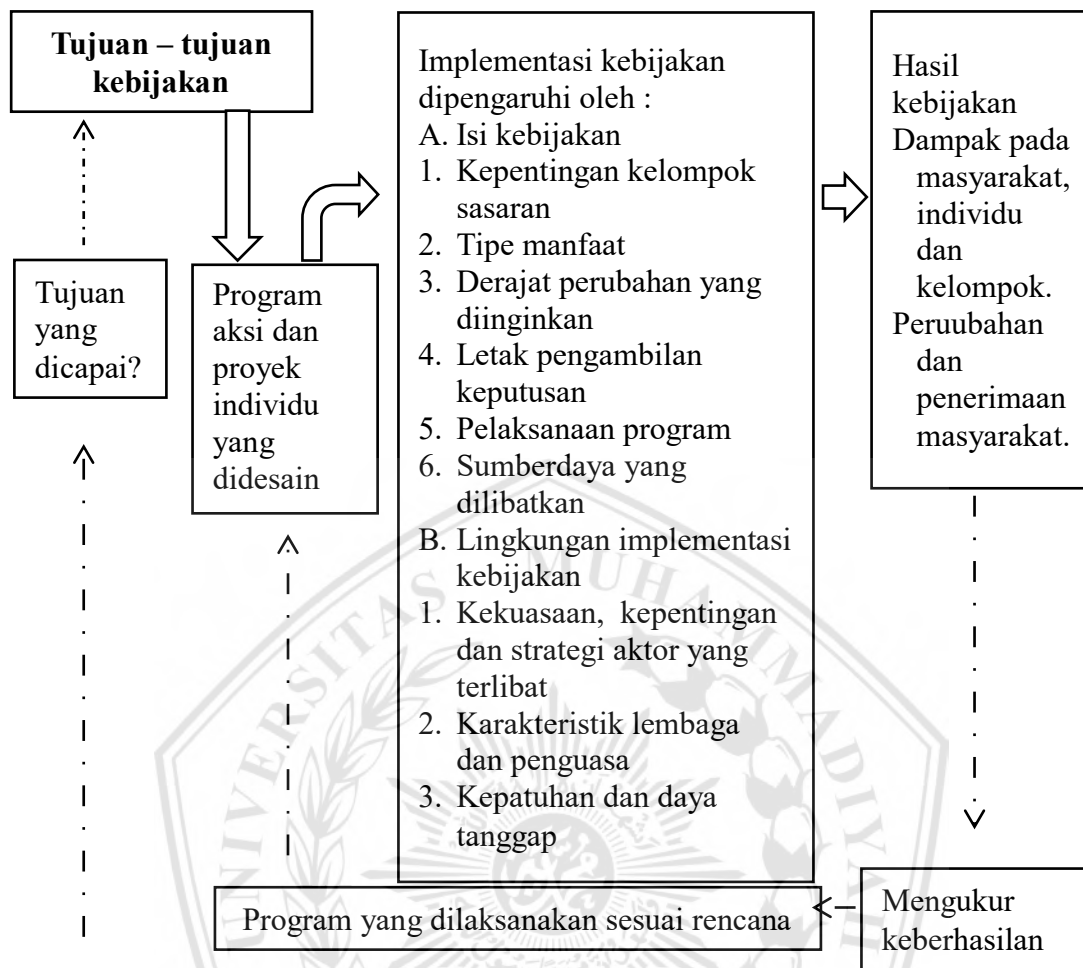
dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Keempat kompetensi tersebut di atas harus bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Namun pada kenyataan yang di asir oleh data IEA tahun 2010 masih belum selaras pada kenyataan yang ada, prihal ini menjadi permasalahan bagi seorang pendidik.

8. Implementasi Kebijakan PPG

Tujuan umum kebijakan adalah untuk meramu secara sistematis beragam gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin ilmu. Dalam hal ini implementasi kebijakan menunjukkan realita pelibatan rasional dan emosional yang teramat kompleks, bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu (Wahab, 2015). implementasi kebijakan mengacu pada perbaikan yang mensyaratkan pemanfaatan pengetahuan diantaranya : 1) komposisi pengguna yang terkait dengan proses pemanfaatan keputusan secara individual maupun pemanfaatan yang mengandung proses pencerahan publik, 2) efek penggunaan, berkaitan dengan efek kognitif dan perilaku atau dengan kata lain berfikir tentang masalah dan pemecahannya, 3) lingkup pengetahuan yang biasa digunakan untuk pengambilan kebijakan bervariasi dari khusus ke umum (Dunn, 2003).

Implementasi pelaksanaan PPG, berawal dari keprihatinan para penggiat terhadap masalah implementasi sebuah kebijakan, dan didapati bukti-bukti yang mengungkapkan ketidakefektifan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Dalam hal ini, kompetensi guru dinilai kurang, dan pemberian sertifikasi belum tepat sasaran. Terkait hal tersebut, keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Wahab (2011), dengan menggunakan diagram yang disusun oleh Grindle, sekiranya proses implementasi kebijakan publik beserta cara mengevaluasinya dapat dipahami dengan mudah. Berikut diagram implementasi sebagai proses dan administrasi yang dikemukakan oleh Grindle:



Bagan 1: Implementasi sebagai proses politik dan administrasi

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan beberapa dasar pada metode penelitian dengan penetapan kriteria yang ditentukan meliputi : pendekatan penelitian, lokasi, teknik pengumpulan data, cara penentuan responden hal di atas akan di sajikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif karena menggambarkan peristiwa-peristiwa. Menurut (Arikunto, 2006) “penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya sendiri. Sedangkan menurut (Afrizal, 2016)

“penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang pelaksanaannya secara sistematis dan intensif untuk mendapatkan pengetahuan tentang fenomena sosial dengan menggunakan fenomena sosial”. Penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena sosial dengan menggunakan fenomena sosial itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah analisis kebijakan program pendidikan profesi guru sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru (study kasus pada ppg umm)

2. Lokasi Penelitian

Universitas Muhammadiyah Malang sebagai lokasi penelitian karena penelitian menganggap tempat tersebut mampu untuk dijadikan sebagai obyek dalam penelitian ini. Sebagai Universitas yang memiliki program PPG. UMM merupakan lembaga pendidikan unggulan yang banyak memberikan ilmu pengetahuan yang luas.

3. Teknik pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapang yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendapatkan data yang valid, maka penelitian menggunakan tiga teknik pengumpulan data meliputi : (1) teknik observasi; (2) teknik dokumentasi; (3) teknik wawancara.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan data tentang : (1) mengetahui langkah apa yang dilakukan pendidikan profesi guru dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru? (2) mengetahui kendala yang dihadapi pendidikan profesi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru?.

Penelitian ini melakukan observasi secara terstruktur kepada 3 peserta PPG di UMM, pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar .

Study dokumentasi untuk memperkuat dan melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumen tersebut berasal dari Pembina PPG dan peserta PPG . penelitian ini merupakan bukti fisik atau dokumen diperlukan sebagai bukti.

4. Subjek Penelitian

Pengambilan data pada penelitian PPG di UMM ini difokuskan pada :

Penetapan Kriteria Informan

Responden yang dipilih sebagai informan pada penelitian ini meliputi peserta PPG UMM sejumlah 3 peserta, dan di dukung oleh Pembina peserta PPG UMM .

Informa di atas sebagai penentu, mendukung dalam kelengkapan memperoleh data penelitian ini supaya memenuhi kriteria pendidikan profesi guru dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru.

Cara Penetapan jumlah Informa

Informa dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini, (Sugiono, 2012)

5. Teknik Analisis Data

analisis data yaitu suatu proses menyusun data agar bisa ditafsirkan dan disimpulkan. Menurut Sugio 2007) ada tiga langkah yang dilakukan dalam proses analisis data, yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3), sajian data. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan ppg sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru.

Pengumpulan Data

Pengolan data yang terdapat dalam penelitian ini adalah : pendidikan, dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

Pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari wawancara, observasi, dan study dokumen yang dikumpulkan, kemudian peneliti terjun secara langsung untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, sajian data, penarik kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data merupakan kegiatan memilih data yang tepat. Data yang masuk, baik dari hasil catatan aktual dilapangan, hasil wawancara, hasil rekaman, ringkasan data, atau hasil data lainnya perlu direduksi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan kasus-kasus yang ada (Sugiono, 2010).

Reduksi data pada penelitian ini ditunjukan untuk menyederhanakan data yang difokuskan lokasinya di Universitas Muhammadiyah Malang mengenai program pendidikan guru sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru. Kemudian menarik kesimpulan sementara.

Data disajikan dalam bentuk katakata, kalimat-kalimat/paragraph-paragraf sehingga bentuk penyajiannya banyak berbentuk uraian teks panjang. Selain itu penyajian data

dilakukan dengan membuat hasil penelitian menjadi ringkasan terstruktur yang dibuat dalam bentuk matriks hasil temuan penelitian.

Menarik atau memverifikasi kesimpulan merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang ditampilkan. Ada banyak cara yang dilakukan dalam memverifikasi data, antara lain dengan cara membandingkan, mengelompokkan, menelaah kasus negatif, dan memeriksa hasil-hasil dengan responden.

6. Penguji Keabsahan Data

Penguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trigulasi metode dengan merujuk pada Sugiono (2013). Teknik trigulasi metode ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, selanjutnya penelitian melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada informasi yang sama.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini dengan melakukan analisis data di program profesi guru Universitas Muhammadiyah Malang, dengan melakukan pengelompokan data dalam beberapa komponen yaitu : (1) langkah apa yang dilakukan pendidikan profesi guru dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru FKIP UMM. (2) kendala yang dihadapi pendidikan profesi guru dalam meningkatkan profesionalisme FKIP UMM.

Peneliti melakukan penggalian data dari informan meliputi 3 peserta PPG dan Pembina PPG UMM. Dengan kode peserta program profesi guru (PSPG) . Dengan kode pembimbing program profesi guru (PMPG) Pembina peserta ppg. Berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa :

1. Langkah Meningkatkan Profesionalisme Guru.

Upaya yang sering dilakukan untuk menjadi guru profesional saat ini harus ada pembinaan dari dosen Pembina secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokarya. Sistem pembelajaran ppg meliputi, lokakarya atau workshop, ppl dan uji kompetensi. Tiga sistem ini harus diterapkan kepada calon guru agar bisa menjadi guru yang profesional. Hasil tentang pelaksanaan penguasaan materi , struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Guru dalam meningkatkan profesionalitasnya harus melakukan kewajibannya dan tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran dengan memberikan materi syarat dasar harus menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata

pelajaran yang diampu, kalau tidak memenuhi itu maka tidak dapat mengajar, mengelola kelas, melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Disamping itu guru profesional juga harus mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Hal diatas didukung oleh informasi dan wawancara peserta PPG dan Pembina PPG mengatakan bahwa.

Dalam meningkatkan kualitas guru yang profesional ada beberapa program yaitu program PPG ada lokakarya atau workshop, ppl dan uji kompetensi. program workshop ini mengajarkan peserta PPG untuk bias menguasai materi, konsep dalam mengajar, membuat rancangan pembelajaran (RPP), membuat penilaian dan pada intinya bias mengelola kelas dan menguasai materi dengan baik. Kalau sudah mendapatkan workshop maka akan terjun langsung di sekolah atau biasa disebut PPL, dalam pelaksanaan ppl aka ada dosen yang membimbing langsung dan melihat kita mengajar. Setelah selesai ppl aka diadakan uji kompetensi. (PSPG 01. 04. 19)

Hasil wawancara di atas juga didukung oleh hasil wawancara dari kepala program pendidikan guru mengatakan bahwa.

Peserta PPG dalam meningkatkan profesionalisme maka diberikan program lokakarya untuk pembekalan ini guna meningkatkan pengetahuan guru yang berkopeten. Juga diberikan program ppl untuk menerapkan pengetahuannya dan setelah selesai itu maka diadakan uji kompetensi. (PMPG. 05. 04.19)

Keadaan ini menunjukan bahwa langkah yang dilakukan untuk menjadi guru yang profesionalisme Struktur kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan tentang menguasai standart kompetensi dan komponen dasar PPG sudah terlaksana dengan baik.

Penemuan dari hasil yang kedua tentang kelangsungan program PPG masih terlaksana dengan baik. Program workshop dilakukan di semester awal dan harus diikuti

oleh semua peserta PPG dan berjalan dengan baik ini dilakukan untuk pemantapan penguasaan kelas dan materi. Setelah mengikuti program workshop selanjutnya akan mengikuti PPL di sekolah yang sudah diarahkan oleh dosen pembimbing, program PPL saat ini sedang berlangsung dan harus diikuti selamat satu semester. Program PPL merupakan program uji kelayakan sebagai guru dan akan dinilai oleh guru pamong sekolah, dosen pendamping dan lembaga dikti. Sedangkan uji kompetensi akan dilaksanakan setelah peserta PPG selesai melaksanakan PPL. Hal ini dinyatakan oleh peserta PPG bahwa:

Program workshop, PPL sudah terlaksana dengan baik, semua sudah dilakukan oleh peserta. Workshop dan ppl harus dijalankan dengan baik biar benar-benar mantap menjadi guru yang professional. Pada bulan mei 2019 baru akan diadakan uji kompetensi guna melihat kemampuan peserta dalam menguasai materi. (PSPG 02. 04. 19)

hasil wawancara dari kepala program pendidikan profesi guru di universitas Muhammadiyah Malang juga mendukung pernyataan yang dilakukan oleh peserta PPG yang menyatakan bahwa:

sejauh ini program yang ada di PPG sudah berjalan dengan baik, ini merupakan kesadaran dari peserta ppg yang benar-benar ingin menjadi guru yang professional kedepannya. Sehingga peserta PPG mengikuti dan menjalankan program dengan baik. (PMPG. 05. 04.19)

Hasil penemuan yang ketiga adalah tentang mengukur keberhasilan PPG.

Pelaksanaan proses pengukuran PPG UMM selama setahun dan terbagi dalam dua semester. Tahapan dari pelaksanaan PPG adalah tahap satu atau semester awal yaitu pembekalan materi seperti kuliah dan workshop, *peer teaching* dan lokakarya.

1. Kuliah dan *workshop*. Kuliah dan *workshop* dilaksanakan pada semester satu.

Jadwal dan materi maupun dosen pengajar sudah ditentukan oleh penyelenggara PPG.

Tim pengajar program PPG diambilkan dari dosen – dosen yang mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang yang memenuhi kualifikasi sebagai pengajar PPG. Materi kuliah adalah materi yang dapat mendukung dan meningkatkan kompetensi profesional seorang guru, seperti materi yang membahas perangkat pembelajaran, strategi belajar mengajar, metode belajar pengajar, membuat media pembelajaran, dan evaluasi. Perkuliahan dilaksanakan dari hari Senin hingga Jum'at. Materi kuliah adalah materi yang dapat mendukung dan meningkatkan kompetensi profesional seorang guru, seperti materi yang

membahas perangkat pembelajaran, strategi belajar mengajar, metode belajar pengajar, membuat media pembelajaran, dan evaluasi. Perkuliahan dilaksanakan dari hari Senin hingga Jum'at.

2. *Peer Teaching*, adalah praktek mengajar yang dilaksanakan peserta PPG dihadapan peserta lainnya dan guru pembimbing. Penilaian diambil dari kelengkapan RPP, proses belajar mengajar, penguasaan kelas serta media pembelajaran yang digunakan.

3. Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK). Pada semester kedua peserta PPG wajib melaksanakan PPLK pada sekolah yang telah ditunjuk oleh penyelenggara. Adapun kegiatan PPLK adalah : pembekalan, observasi, pembekalan di sekolah mitra, praktik pembelajaran sebanyak delapan kali, kegiatan manajemen sekolah, penelitian tindakan kelas, dan uji kompetensi kinerja.

4. *Post test*.

Post test atau ujian akhir dilaksanakan setelah semua kegiatan PPG selesai. Ujian akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengingat materi yang disampaikan ketika masa perkuliahan serta mengukur sejauhmana pengetahuan yang diserap selama mengikuti perkuliahan program PPG.

Keberhasilan program PPG UMM dalam mengembangkan kompetensi profesional guru. Peserta PPG UMM mampu meningkatkan kemampuan dalam bidang pengelolaan kelas, proses belajar mengajar, penggunaan media pembelajaran, menentukan strategi belajar, penilaian, serta pembuatan RPP. Selaian hal diatas tersebut pesera PPG juga bertambah wawasan karena tidak hanya hal yang terkait dengan pembelajaran saja yang diajarkan melainkan wawasan secara umum untuk meningkatkan pengetahuan peserta PPG. Peningkatan dalam bidang teknologi juga meningkat sangat signifikan, disebabkan tuntutan yang mengharuskan setiap peserta menggunakan IT dalam setiap pembelajaran dikelas maupun di tempat PPLK. Peserta PPG juga mampu membuat RPP baik berdasarkan kurikulum KTSP 2006 maupun Kurikulum 2013 serta menentukan sistem evaluasinya. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dari peserta PPG UMM yang mengatakan bahwa :

Untuk meningkatkan dan mengukur keberhasilan peserta PPG ada dua tahap atau 2 semester. Tahap pertama itu ditempuh selama enam bulan dan kegiatan yang harus di tempuh adalah seperti *workshop* dan *peerteaching*, workshop peserta diharuskan

mengikuti kegiatan – kegiatan berupa seminar. Sedangkan *peerteaching* peserta harus bertukar pemikiran dalam pengetahuan menguasai materi. Sedangkan di semester ke dua peserta dibekali PPL dan post test. Kegiatan PPL dan post test dilakukan untuk

Hasil wawancara dari peserta PPG UMM juga di dukung pendapat kepala PPG menyatakan bahwa :

Ada dua semester yang harus ditempuh oleh peserta PPG untuk mengukur keberhasilan peserta PPG. Satu semester pertama peserta mendapatkan pembekalan atau penguasaan materi yang akan di ajarkan pada semester ke dua. Semester pertama tugas peserta PPG meliputi *workshop*, *peerteaching*, dan loka karya. Sedangkan di semester ke dua peserta harus melakukan praktik langsung untuk mengajar. Setelah selesai praktik mengajar atau PPL peserta akan di uji kompetensinya melalui *post test*. *Post test* ini di tujukan untuk menguji seberapa jauh peserta mampu menguasai materi yang di ampu. (PSPG.3. 05.04.19)

2. Kendala yang dihadapi pengelola pendidikan profesi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru di umm.

Hambatan Internal

Hambatan internal dalam hal ini adalah hambatan yang berasal dari diri peserta sendiri sebagai pendidik dan guru profesional. Kesulitan yang di alami oleh peserta PPG UMM yang bersifat internal adalah kurang menguasai pedagogik salah satu contohnya kurang menguasai materi, kurang menguasai konsep dan pola keilmuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan peserta PPG.

Kesulitan yang kita alami adalah kesulitan menguasai standar kompetensi dalam pengajaran. Karena teori dan aplikatif sering tidak selaras. Apalagi menganut K-13 dalam penyampaian materi tidak belajar konsep tapi aplikatif jadi harus mencari data yang nyata sehingga untuk mencari data yang nyata itu kesulitan dan perlu belajar lagi (PSPG.3. 05.04.19)

hal demikian juga di ungkapkan oleh ketua PPG UMM menyatakan bahwa

kesulitan yang sering dialami peserta adalah penguasaan pedagogik, menguasai materi, mengembangkan materi ajar dan penggunaan teknologi. Peserta masih ada beberapa yang belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, sebagian besar peserta yang berasal dari plosok yang masih minim teknologi di daerahnya (PMPG. 05.04.19)

Hambatan lain yang ditemukan dilapangan adalah permasalahan internal pendidikan meliputi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan peran guru (pendidik) dan siswa sebagai peserta didik.

Peran guru (pendidik), salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan taknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variable penting bagi keberhasilan pendidikan.

Peran guru sebagai tenaga pendidik tidak hanya berhenti sebagai pemegang tonggak peradaban saja, melainkan juga sebagai rahim peradaban bagi kemajuan zaman. Karena dialah sosok yang berperan aktif dalam pentransferan ilmu dan pengetahuan bagi anak didiknya untuk dijadikan bekal yang sangat vital bagi dirinya kelak. Bahkan yang lebih penting disamping itu, mereka mampu mengembangkan dan memberdayakan manusia, untuk dicetak menjadi seorang yang berkarakter dan bermental baja, agar mereka tidak minder dalam meghadapi masalah dan dapat bersikap layaknya seorang ksatria. Hal ini sesuai dengan pernyataan peserta PPG

Kopetensi guru yang kurang memadai merupakan habatan dalam proses pembelajaran. Karena guru merupakan ujung tombak keberhasilan dan berjalanya pembelajara di sekolah. (PSPG.3. 05.04.19)

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komponen tentang kendala atas penguasan profesionalisme guru masih terhambat salah satu faktor terbesarnya adalah kurang menguasai kemampuan pedagogik, sehinga untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif masih terhambat oleh internalnya sendiri.

Hambatan lain yang terjadi adalah hambatan eksternal

Hambatan lain yang terjadi adalah pada pelaksanaan PPG 2018 belum banyak sekolah mitra yang berbasis K13. Hal ini sedikit menyulitkan peserta dan panitia dalam menentukan perangkat pemebelajaran karena menyesuaikan dengan kondisi sekolah mitra. Untuk itu pelaksanaan PPG tahun 2018 UMM melakukan kerjasama dengan sekolah yang berbasis K13. Sehingga pembuatan RPP dapat disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah.

Pelaksanaan PPG tahun 2018 pendalaman materi lebih diperbanyak. Pendalaman materi yang diberikan merupakan bekal ilmu yang bertujuan menyiapkan peserta agar mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik sehingga siap untuk melaksanakan PPL yang akan mereka tempuh pada semester depan. Dalam hal ini, tidak merupakan kendala yang besar hanya saja peserta mengaku sulit membagi waktu ketika harus mengerjakan banyak tugas yang bersamaan.

Hambatan eksternal K13 yang dihadapi PPG UMM juga penerapan kurikulum 2013 di antaranya yaitu: a) Materi pada buku siswa kurikulum 2013 tidak beraturan, ini membuat guru sedikit bingung karena urutan materi pada buku siswa tidak sesuai dengan silabus, selain itu urutan materi pada kurikulum 2013 agak rancu tidak seperti pada kurikulum sebelumnya. b) Pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific yang terdiri dari 5 tahap (5 M) yaitu : Mengamati, Menanya, menalar, Mencoba dan Membentuk jejaring. Kendala yang ditemukan yaitu pada saat memilah-milah mana kegiatan belajar yang termasuk kedalam tahap mengamati, menanya, menalar, mencoba atau membentuk jejaring. Hal ini membuat guru bingung pada pelaksanaan pembelajaran sehingga tidak jarang jika guru sudah merasa bingung, guru kembali menggunakan pembelajaran langsung (Ekspositori) pada saat pembelajaran.

Perubahan kurikulum, Kurikulum yang diberlakukan di sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah, atau yayasan pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan tuntutan kemajuan masyarakat. Dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat timbul tuntutan kebutuhan baru dan akibatnya kurikulum sekolah perlu direkonstruksi. Adanya rekonstruksi itu menimbulkan kurikulum baru. Perubahan kurikulum sekolah menimbulkan masalah seperti tujuan yang akan dicapai mungkin akan berubah, isi pendidikan berubah, kegiatan belajar mengajar berubah serta evaluasi berubah.

Pendapat tersebut, diperkuat oleh pendapat peserta PPG.

Penambahan pembelajaran bukan permasalahan besar tapi, yang menjadikan kita keberatan karena materi K13 harus mencari materi sendiri. Sedangkan peserta dan sekolah masih merasa asing dengan program K13. (PSPG 02.04.19)

Hal demikian di perjelas oleh kepala PPG

Bimbingan khusus untuk menambah materi yang disiapkan untuk pendalaman materi penyiapan jadi guru. Perbaikan K13 menjadi wujud penambahan materi yang disiapkan oleh kepanitiaan.(PMPG. O5.04.19)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen tentang kendala atas penguasaan profesionalisme guru masih terhambat salah satu faktor K13 masih belum familiar dan K13 masih menyulitkan karena belum ada panduan RPP nya.

E. PEMBAHASAN

program profesi guru (PPG) dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi utuh, yaitu unggul dan berkarakter sikap perduli lingkungan / sesama, jiwa disiplin, berkerjasama dan jujur. Untuk mencapai tujuannya, tidak hanya fasilitas, pengampu dan kurikulum yang disiapkan, melainkan peserta juga disiapkan agar dapat mengikuti program tersebut dengan baik. Dalam hal ini, pelaksanaan program PPG UMM didukung dengan panduan pelaksanaan PPG.

Sistem pembelajaran PPG UMM umumnya terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang mencakup 1), pleno 1 yang dibagi menjadi orientasi PPG, sistem PPL, dan evaluasi PPG. Pleno 2 mencakup pemaparan kurikulum untuk tiap-tiap bidang studi dan persiapan workshop pengembangan perangkat pembelajaran. 2) workshop dengan pembimbing , dosen pengampu dan guru pamong . Pleno 3 tentang presentasi hasil workshop yang dilakukan dengan teman sejawat. (Nanang dan Tito, 2013).

Implementasi kebijakan PPG di UMM

Pada dasarnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua hal yang mencakup isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam hal ini, pelaksanaan PPG UMM dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. isi kebijakan

meninjau penelitian terdahulu disebutkan kurangnya penguasaan pedagogik guru dikarenakan kurangnya kesadaran dan penguasaan terhadap materi perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, pengembangan kurikulum (Setiawan 2017), selain itu, hambatan dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru di pengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi : 1), sikap kontervatif guru, 2), kurang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, 3), rendahnya motivasi guru, 4), rendahnya motivasi guru. Sedangkan eksternal : 1), kurang kegiatan seminar dan lokakarya 2), media dan

buku-buku paket, 3), kurangnya motivasi orang tua (Suyono, 2014). Dalam hal ini, program PPG merupakan program jangka panjang yang menyiapkan guru profesional. Sedangkan untuk jangka pendek merupakan program yang memotivasi guru supaya mau belajar dan termotivasi menjadi guru profesional.

Pelaksanaan PPG prajabatan bertujuan untuk mencetak guru profesional yang menguasai empat kompetensi yang di harapkan. Lama pendidikan yang berjalan selama satu tahun maka diharapkan mampu menjamin mutu pendidikan dan profesionalitas seorang guru. Sebagaimana yang dijelaskan dalam permendikbud nomor 87 tahun 2013 tentang program PPG pada pasal 2 tujuan proram PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, dan mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan. Selain itu dalam pelaksanaan PPG bermuara pada pembuatan lokakarya. Seperti yang diungkap oleh pasal 9 ayat 3 bahwa : lokakarya perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan beorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dan menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Sistem pembelajaran pelaksanaan PPG UMM sejalan dengan pelaksanaan sistem pembelajaran kemenristek. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan PSPG (peserta PPG) meliputi : persamaan presepsi, pendalaman materi, penentuan bahan ajar, penyusunan silabus RPP, presentasi, peer teaching.

Menjadi LPTK penyelenggara merupakan hal yang sangat berat dan tidak mudah untuk dijalani, karena terdapat banyak tugas dan tanggungjawab yang harus diembani oleh kepanitiaan. Dalam hal ini banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh LPTK diantaranya : mempunyai dosen tetap dan harus mempunyai dosen bersetara doctor atau S3 degan jabatan paling rendah lektor dan empat orang berkualifikasi master S2, dengan jabatan akademik paling rendah lektor. Selain itu, dituntut memiliki sarana dan prasarana yang mendukung terlaksnaya PPG. Lebih lanjut memiliki akraditasi B. Dalam hal ini UMM sudah memenuhi syarat karena UMM memiliki ruang micro teaching,

laboratorium bidang studi, dan memiliki buku referensi yang relevan untuk mendukung PPG. Didukung dengan tenaga pengajar yang profesional di bidangnya.

Lebih lanjut PPG melibatkan banyak yang terdiri dari panitia PPG yang dibagi atas tim Universitas, fakultas, dan program studi. Pada tingkat fakultas dan prodi masing-masing menyiapkan satu dosen pengajar. Sebagaimana dijelaskan dalam permendikbud pada pasal 1 ayat 2 peraturan yang dimaksud adalah : Pendidikan program profesi guru prajabatan yang selanjutnya disebut PPG adalah program yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan SI kependidikan dan S1/D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat untuk menjadi guru yang bisa menguasai kompetensi guru secara utuh.

Selaras dengan hal tersebut, UMM terpilih sebagai LPTK penyelenggara yang berhak melaksanakan program PPG. Dalam hal ini, sebagai LPTK penyelenggara UMM membentuk kepanitiaan yang terdiri dari pihak Universitas, fakultas dan prodi. Dengan uraian kepanitiaan yang meliputi pengarah, penangungjawab, ketua, wakil ketua bidang akademik, wakil ketua sarana dan prasarana, sekertaris, wakil sekertaris, bendahara, prodi matematika, prodi PGSD, devisi pengendali, devisi workshop, devisi PPL, devisi asrama, devisi IT dan pengadaan barang. Pihak lain yang terlibat adalah sekolah mitra dan kemenristek dikti. Lebih lanjut, dalam setiap pembelajaran dibutuhkan dosen sebagai fasilitator agar peserta dapat mencapai tujuan program PPG melalui materi dan workshop yang disampaikan. Melalui pembelajaran yang inovatif diharapkan penyampaian pesan melalui materi dapat diterima oleh peserta secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai optimal.

2. Lingkungan Implementasi

Program PPG merupakan sebuah terobosan untuk mencetak calon guru profesional, khususnya guru prajabatan. Program PPG membuka peluang bagi calon guru, yang berasal dari kependidikan maupun non kependidikan yang berminat menjadi guru. Awal terbentuknya PPG merupakan upaya terakhir LPTK untuk meningkatkan kompetensi guru, karena program sebelumnya dianggap belum mampu memberikan perubahan yang signifikan. Awal terbentuknya PPG diinisiasi oleh keberadaan guru honorer di sekolah dan selanjutnya menjadi program profesi untuk sarjana kependidikan maupun non kependidikan. Sebagaimana di muat dalam permendikbud pasal 1 ayat 3 bahwa program PPG diselenggarakan untuk menyiapkan

lulusan S1 kependidikan dan non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru yg professional.

Serangkaian paparan isi kebijakan dan lingkungan implementasi, maka hasil pelaksanaan PPG UMM diharap berdampak terhadap masyarakat, individu maupun kelompok. Selain itu diharapkan membawa perubahan dan mendapat penerimaan dari masyarakat, dalam hal ini implementasi PPG meliputi: 1) menguasai kompetensi pedagogi, 2), menyiapkan guru yang kreatif dan inovatif, 3), memotivasi guru agar mempunyai program berkelanjutan dalam menjadi guru yang professional, 4), menguasai pedagogic diharapkan bisa membawa dampak positif.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi PPG

Pelaksanaan PPG 2018 belum banyak sekolah mitra yang berbasis K13. Hal ini sedikit menyulitkan peserta dan paniti dalam menentukan perangkat pembelajaran karena menyesuaikan dengan kondisi sekolah mitra. Untuk itu pelaksanaan PPG tahun 2018 UMM melakukan kerjasama dengan sekolah yang berbasis K13. Sehingga pembuatan RPP dapat disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah.

Tujuan yang ingin dicapai adalah membuat lokakarya, merancang pembelajaran dan menguasai kompetensi pedagogic. Sebagaimana system pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kemenristek, sehingga pelaksanaan PPG mengacu pada konteks, imput dan proses.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil peneliti dan pembahasan yang telah di uraikan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

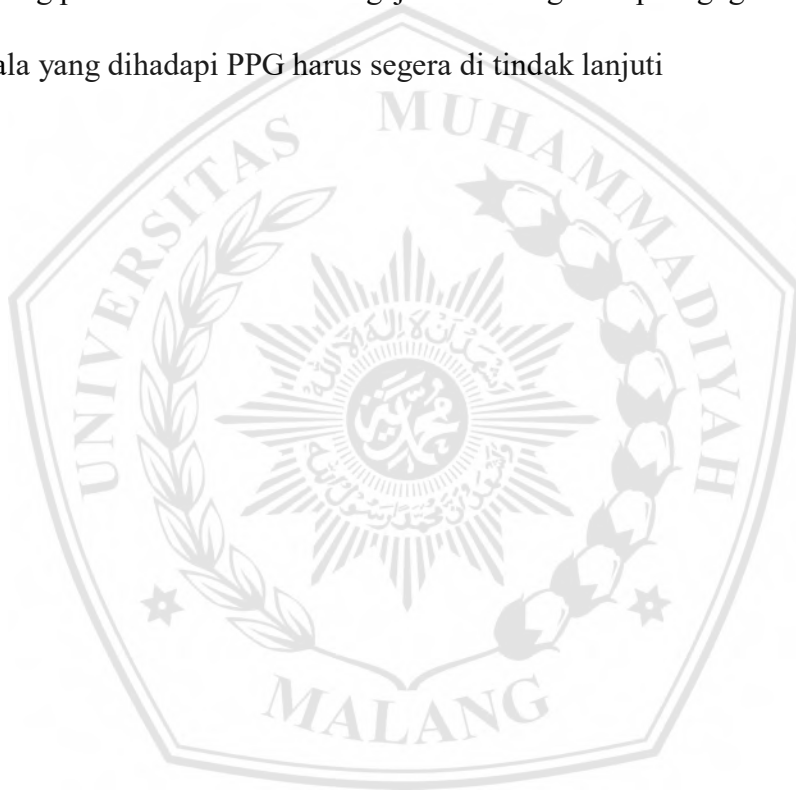
1. Implementasi pelaksana PPG UMM, melalui serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan PPL sekolah mitra. Pembelajaran di dalam kelas meliputi pendalaman materi, perumusan indicator, penyusunan silabus , presentasi, peer teaching, tes formatif. Selanjutnya PPL di sekolah mengukur penguasaan kompetensi yang di dapat di dalam kelas. Dengan demikian rangkaian PPG bertujuan untuk menciptakan guru yang professional, menyiapkan guru yang trampil dan pembentukan empat kompetensi.

2. Factor penghambat PPG UMM 2018 di pengaruhi oleh ketidak siapan K13 di sekolah.

SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut maka perlu disertakan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu pelaksanaan PPG.

1. Program PPG untuk kedepanya perlu memaksimalkan pendalaman materi, bahan ajar dan menambah jam belajar.
2. Pelaksana program PPG perlu ditingkatkan lagi agar lebih maksimal dan melahirkan guru yang professional dalam mengajar dan menguasai pedagogik
3. Kendala yang dihadapi PPG harus segera di tindak lanjuti



DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Anwar.Us.Kasful.2015. *Jaminan Mutu dan Upaya Pengembangan Profesionalitas Guru Pada Abad Pengetahuan*.Jurnal Nur El-Islam.
- Arifin, I. 2000. "Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi".Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001
- Arikunto S, 2006. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Aswandi (2015). *Pengembangan Kopetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Guru*
- Dun, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Public* Yokyakarta: Yokyakarta press
- Haryono, Agus (2014). *Analisis kopetensi pedagogic dan professional guru di smpn 3 tarakan. Thesis s2 kebijakan dan pengembangan*.
- Idris, Andris. (2013). *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Serifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan Danpemerataan Guru Di Kabupaten Bulungan* . ISSN 000-00 Journal ip
- Innayattullah (2011). *Kontribusi factor-faktor internal dan eksternal terhadap peningkatan kinerja professional guru*
- Lutfi Okta Zahro. 2017. *Aalisis keterlaksanaan kopetensi pedagogik guru dalam penerapan pembelajaran drama kelas VIII SMP Muhammadiyah Batu*.
- Mahsunah.Dian.dkk. 2012. *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*
- Maksum (2012). *Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru kota Tarakan*
- Margono . (2013). *Analisis kegiatan pengembangan profesi guru pasca sertifikasi*. Tesis S2 kebijakan dan pengembangan. Tidak terpublis di UMM
- Muhson, Ali. 2014. *Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol, 2 No. 1 Agustus 2014.

Pangestika, Ratna dan Fitri Alfarisa (2015). Pendidikan profesi guru (PPG) strategi pengembangan profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015 Uny

Peraturan menteri pendidikan nasional no. 8 tahun 2010 tentang pendidikan profesi guru dalam prajabatan

Peraturan menteri pendidikan nasional no. 9 tahun 2009 tentang pendidikan profesi guru dalam prajabatan

Peraturan pemerintah RI No 74 tahun 2008 Tentang Guru

Rahmawati, Yuana Dewi. (2013). *Peran mgmp dalam meningkatkan kompetensi guru matematika smp negri di kabupaten pamekasan. Tesis s2 kebijakan dan pengembangan* tidak di pablis UMM

Rohman (2015). *Pengembangan Kopetensi Pedagogik Dan Professional Guru*

Rudy, Gunawan (2016). *Implementasi Pengembangan Profesionalisme Bagi Guru Bersertifikat Pendidik.*

Sagala, H. Syaiful. 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta

Setiyawan Deni. 2017. *Analisis pengembangan profesi guru tematik untuk memenuhi tuntutan profesionalisme kinerja guru di SMP 1 Wlingi Kab. Blitar.*

Sudja.I Nengah.2013. *Pembelajaran Demokratis Menuju Profesionalisme Guru.*Jurnal Santiqji Pendidikan, ISSN

Sugiono, (2013) *metode penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif, kuantitatif R & D.* Bandung AL Fabeta

Sugiono, *Metode kualitatif , kuantitatif R & D 2017*

Sutoyo. *Jurnal Meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan profesi guru, vol 9 januari 2014*

Suwarna. 2004. *Guru Profesional, Variabel Investasi di Era Otonomi. Kedaulatan Rakyat, 22 Mei 2004.*

Trianto dan Tutik (2007). *Analisis pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan berkewajiban memenuhi jam mengajar.* Program studi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 8 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 35 Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Wahab Solihin Abdul (2011). Pengantar analisis kebijakan publis . Malang UMM pers

Yohan, corry (2014). *Sertifikat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jurnal dinamika pendidikan nomor 01/Th. XXI/ mei 2014*

Yusuf & Ruslan. 2014. pengaruh kopetensi profesional guru biologi yang telah tersertifikat terhadap hasil belajar siswa si Sma se-kota ternate. Jurnal Bio Edukasi 3(1) ISSN 2301-4678.

Yusuf.Ahmad.2016. *Model-Model Pengembangan rofesionalisme Guru. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016*

Zainal, Aqib. (2007), *Membangun Profesionalisme Guru Dan Pengawasan Sekolah* , Bndung : Alfabeta

